Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

KEBUTUHAN PEREKRUTAN GURU PNS

DAFTAR ISI

1 Perhitungan Kebutuhan Guru

2 Alternatif Mekanisme Perekrutan Guru

3 Kebutuhan Dana

4 Langkah-Langkah Yang Harus Ditempuh

5 Tindak Lanjut

6 Pendataan Melalui Dapodik dan Permendikb
No 10 Tahun 2018

©Kemendikbud 2018

Pengendalian Formasi versi Undang-undang 23/2014 yang menjadi kewenangan Kemendikbud

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

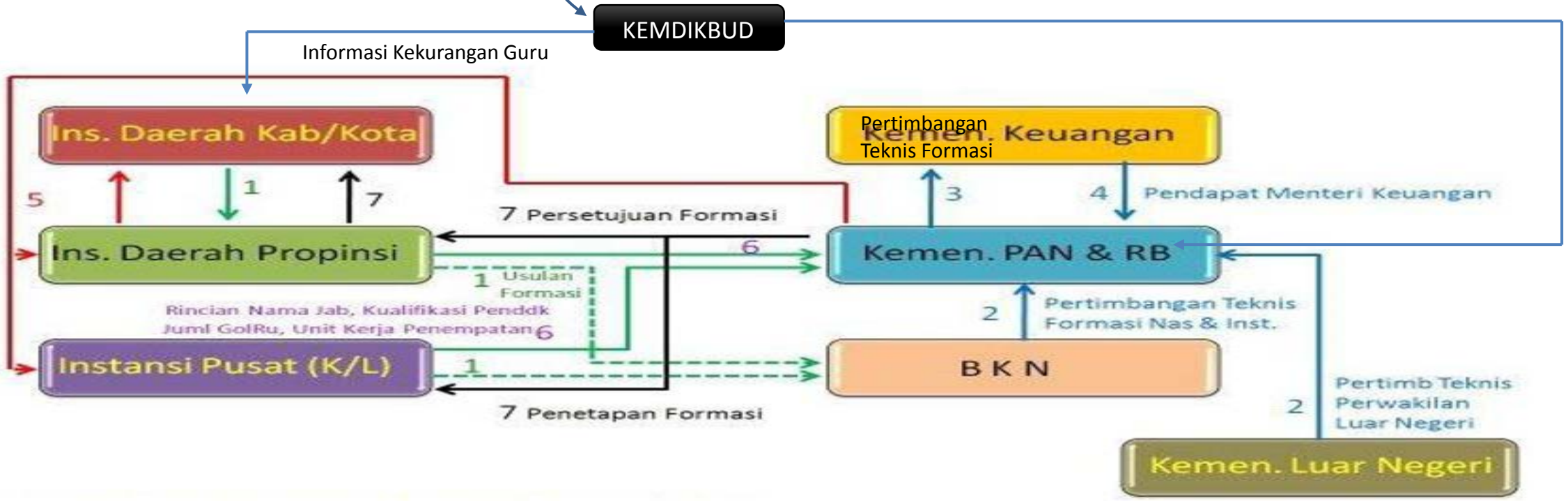

Catatan :
Belum dilibatkannya Kemendikbud dalam pengendalian formasi Guru sesuai amanat UU 23/2014

01

Perhitungan Kebutuhan Guru

Pertambahan Jumlah Sekolah dan Siswa Sekolah Negeri 2010-2017

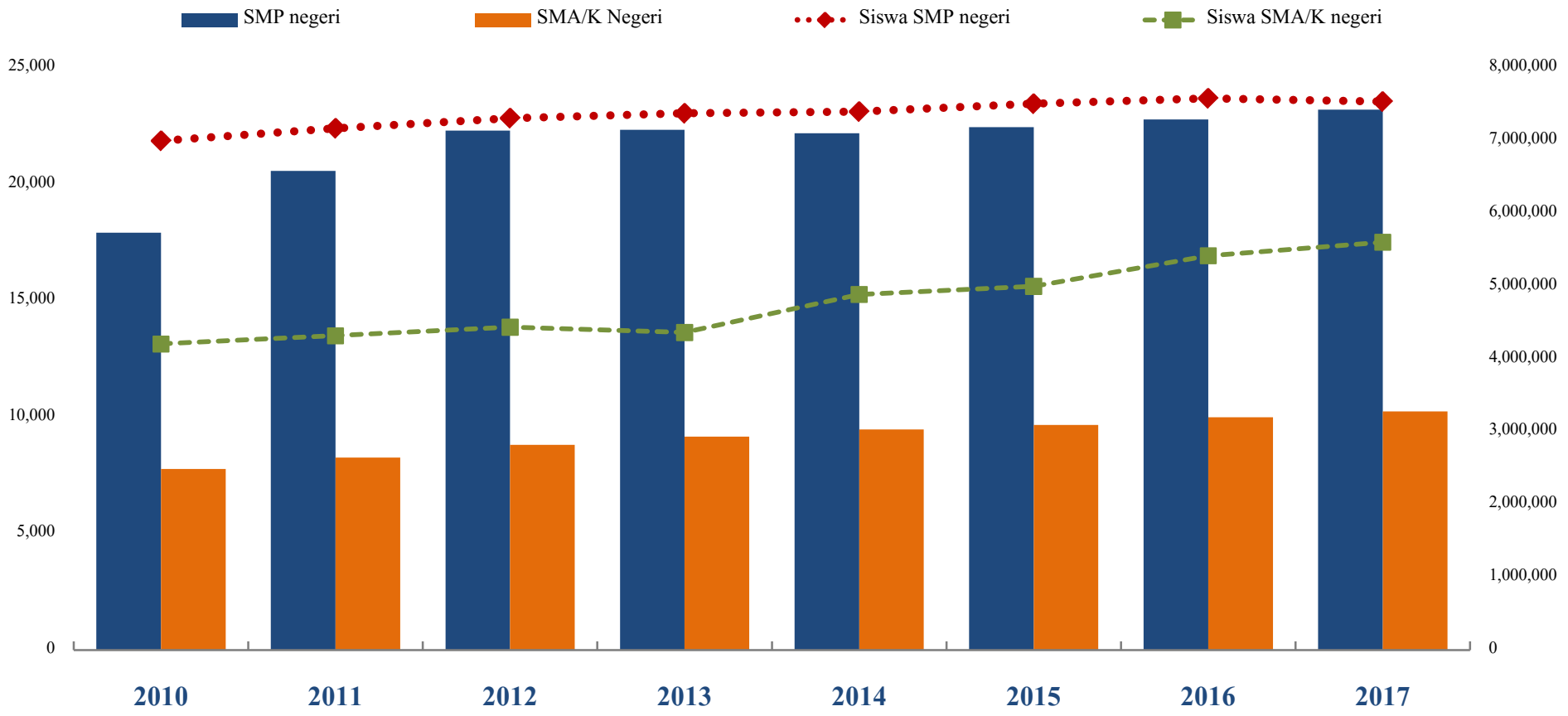

Tapi pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa di sekolah negeri *tidak disertai* dengan pemenuhan Guru PNS.

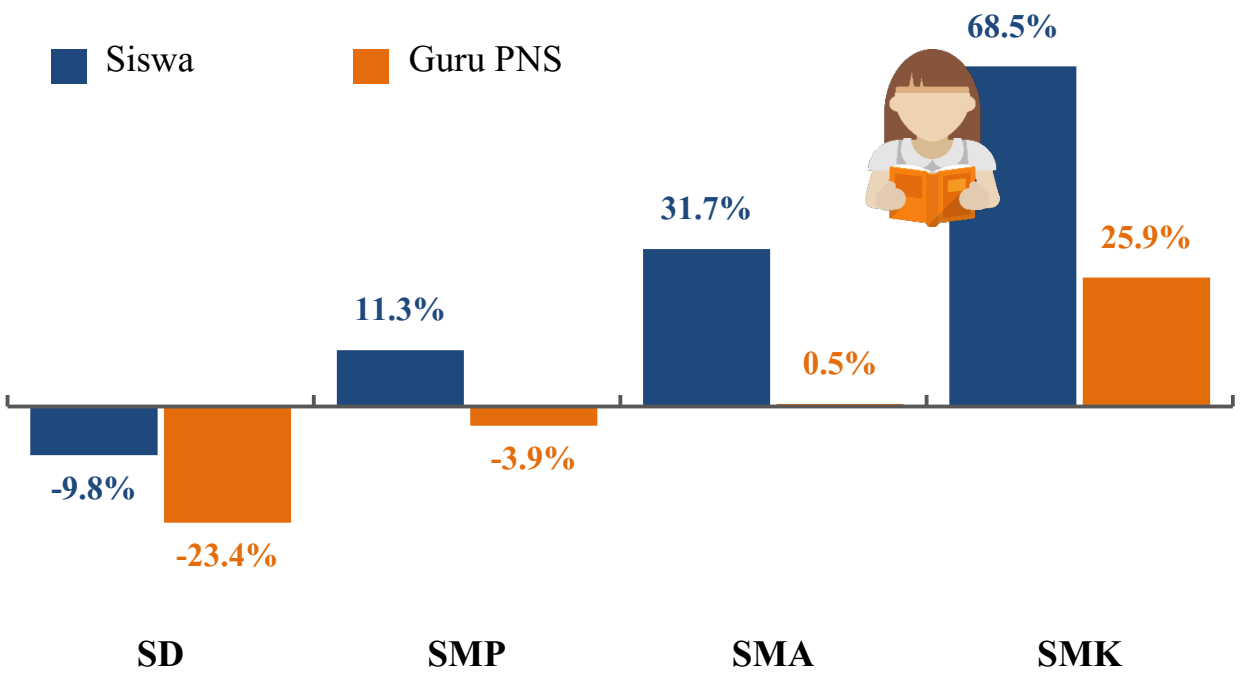

Bahkan untuk jenjang SD, *jumlah guru PNS menurun 2 kali lipat* dari penurunan jumlah siswa.

Sekilas, rasio **guru : murid** kita nampak ideal.

	SD	SMP	SM
Indonesia	**17**	**16**	**16**
India	33	30	31
Tiongkok	16	12	16
Jepang	11	13	17
Belanda	15	14	12

Sehingga, rasio **guru PNS: murid** di sekolah negeri sebenarnya jauh lebih tinggi.

Guru PNS: murid sekolah negeri

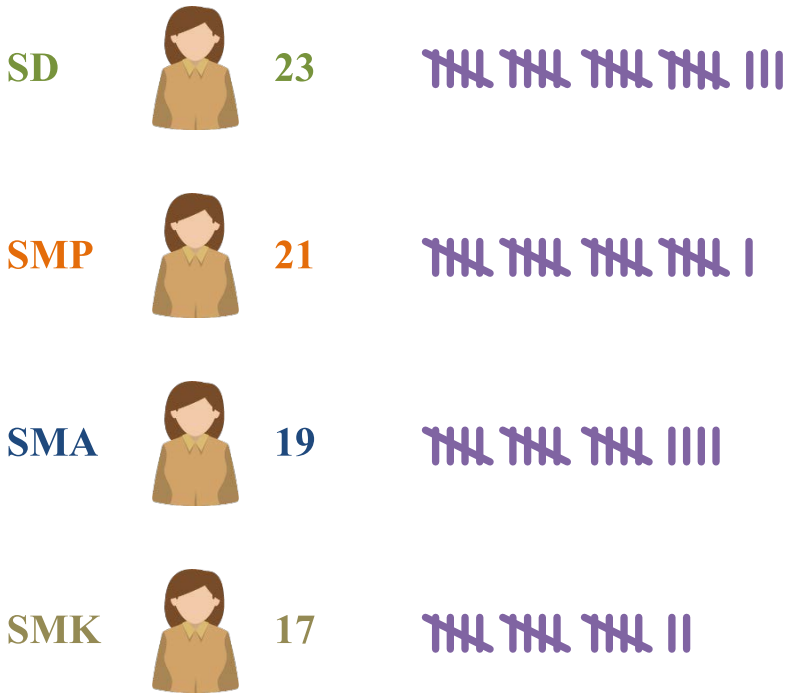

Namun, **51%** dari total guru di Indonesia terdiri dari guru non-PNS.

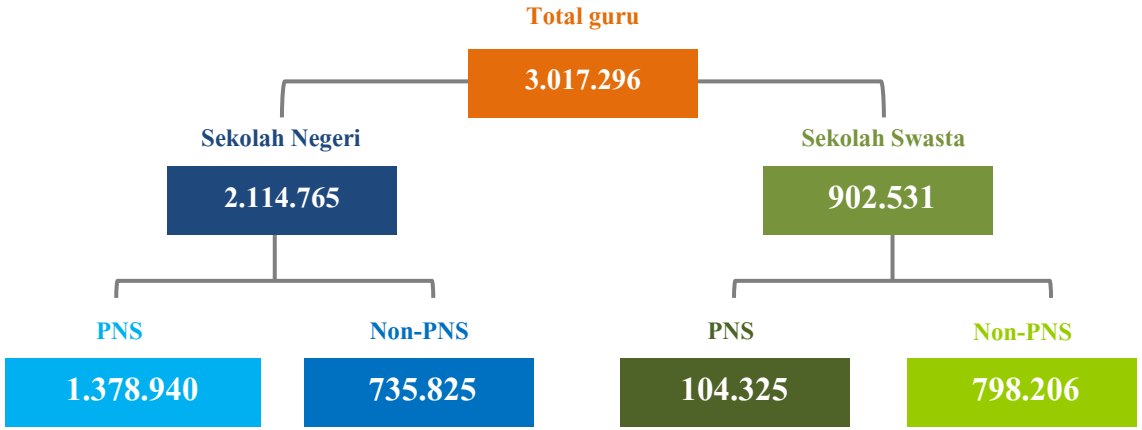

Ditambah lagi, persebaran guru PNS *tidak merata.*

Rasio guru PNS: siswa sekolah negeri

25% tertinggi **25% terendah**

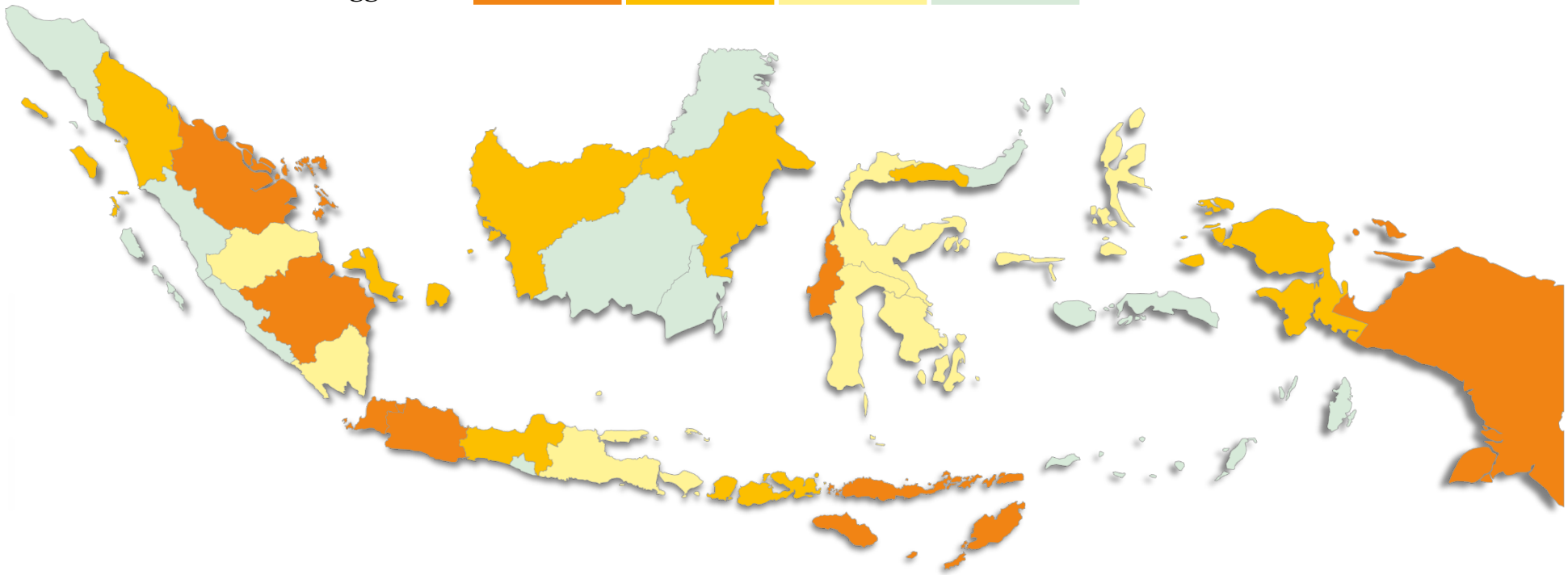

Jumlah guru PNS yang direkrut *jauh lebih rendah* daripada yang pensiun.

Perbandingan jumlah guru PNS yang pensiun dengan guru PNS baru yang direkrut

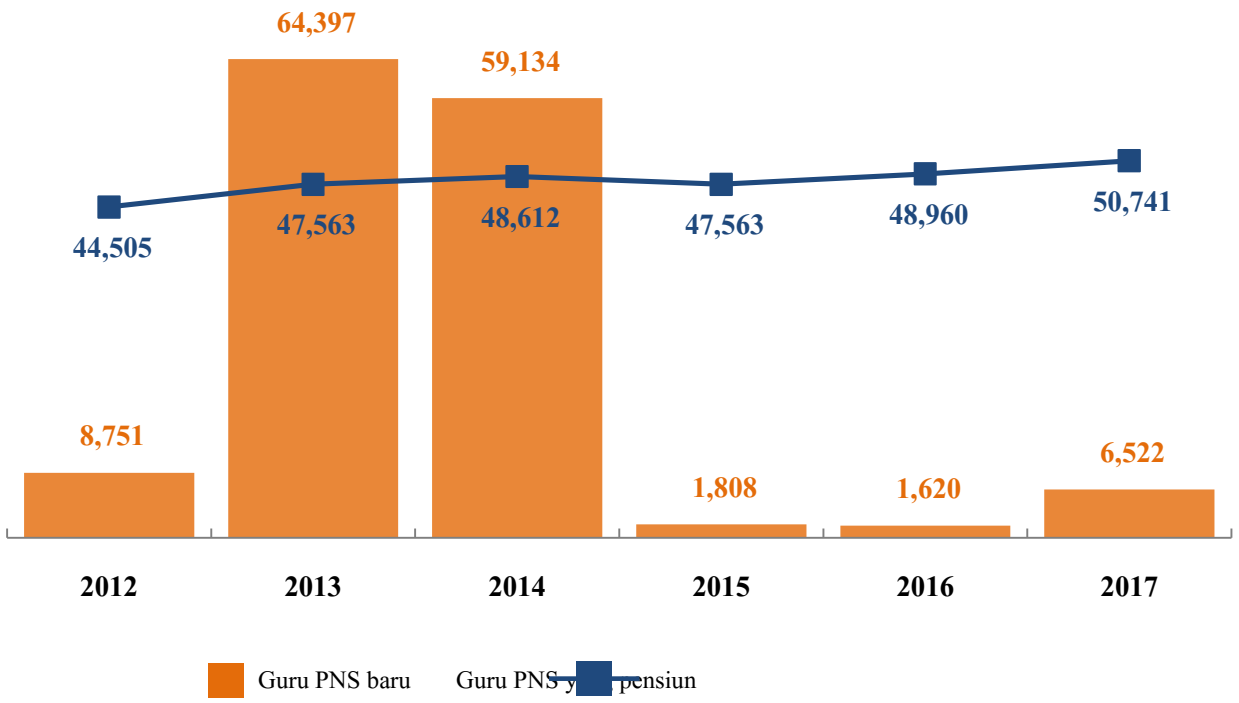

Sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru honorer melalui *proses seleksi yang tidak jelas.*

"Teacher and academic appointments have tended to be made on the basis of loyalty, friendship, and familial connections rather than merit..."

Rosser in *Beyond access: Making Indonesia's education system work* (2018)

Guru PNS didorong untuk menjalani sertifikasi, sehingga *kompetensi mereka lebih terjamin.*

Di sekolah negeri, *4 dari 5* guru PNS sudah bersertifikat.

Tapi **98%** guru non-PNS belum bersertifikat.

Pendapatan guru non-PNS *cenderung jauh di bawah* pendapatan guru PNS.

Rata-rata pendapatan guru PNS bersertifikat mencapai Rp6,4 juta per bulan, sedangkan guru non-PNS tidak bersertifikat sekitar *seperenamnya saja.*

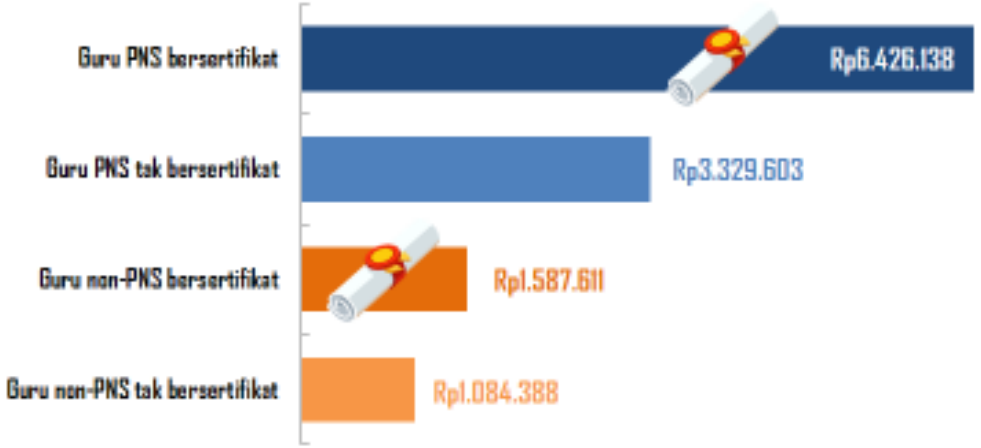

Semakin baik rasio guru PNS: murid sekolah negeri, cenderung semakin baik juga hasil belajar siswanya.

Y: Nilai UN

X: Rasio guru PNS: murid di sekolah negeri

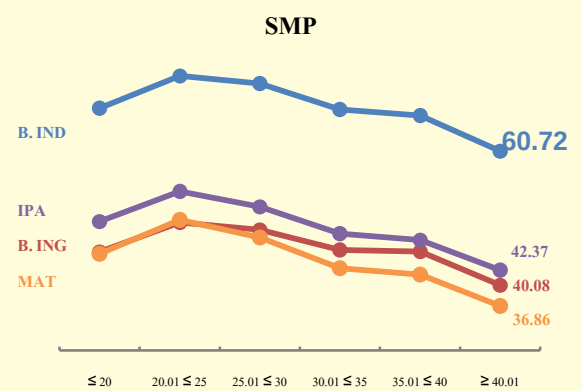

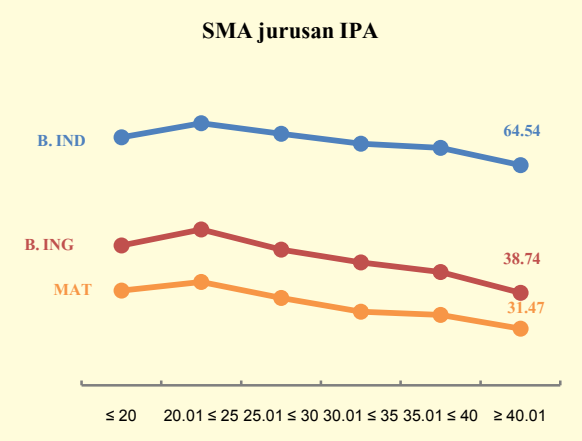

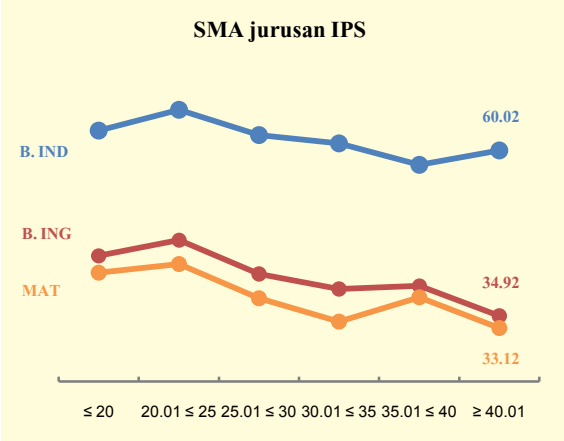

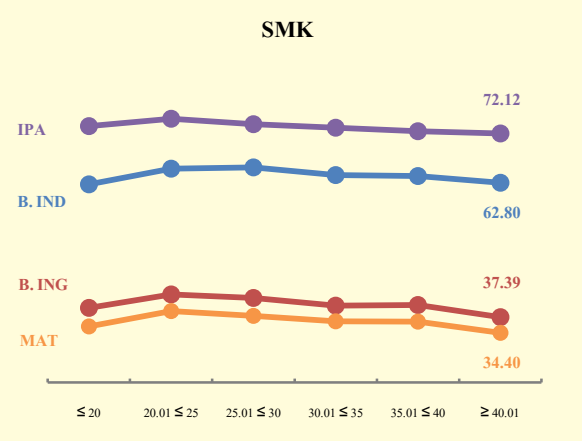

Catatan; dihitung menggunakan data di sekolah dengan UNBK

Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kita butuh sekitar 988.133 guru PNS.

Namun, bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS.

Jumlah kekurangan guru PNS di sekolah negeri pada tiap jenjang menggunakan PERHITUNGAN STANDAR dan PERHITUNGAN EFISIENSI.

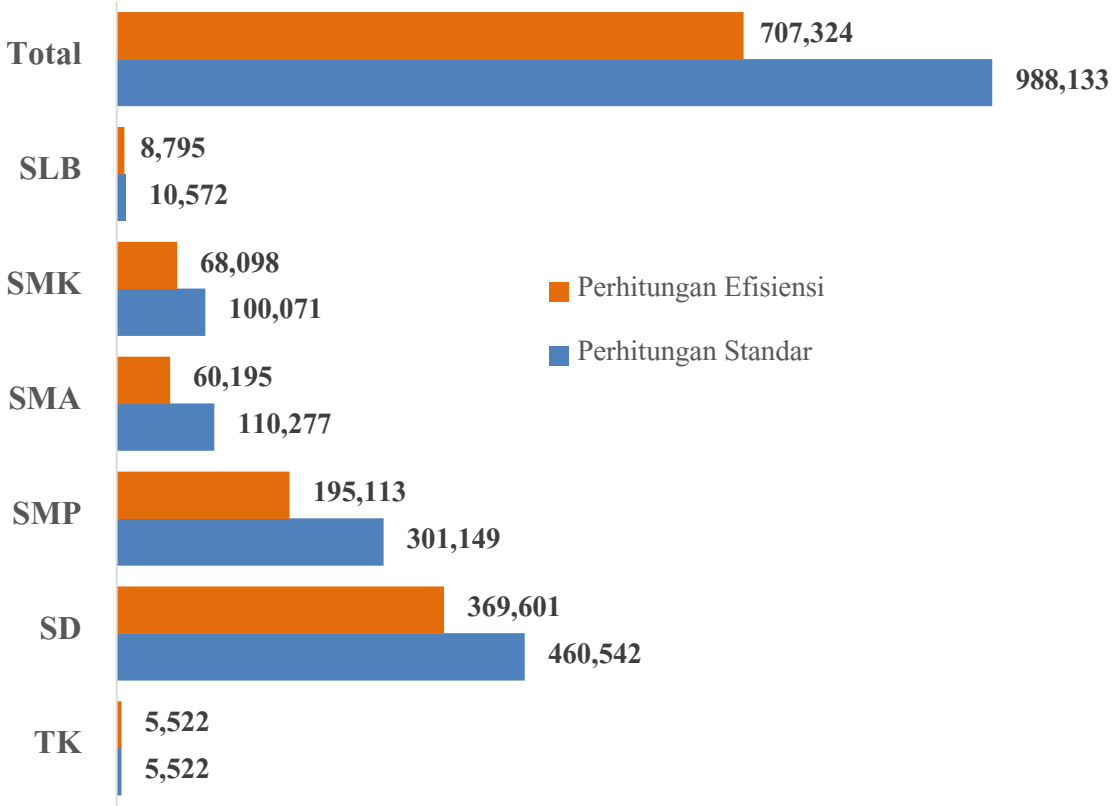

PERHITUNGAN STANDAR:

guru mengajar maksimal 24 jam pelajaran seminggu, **tanpa** *multi-grade* dan *multi-subject teaching*.

PERHITUNGAN EFISIENSI:

guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu, **dengan** *multi-grade* dan *multi-subject teaching*.

02

Alternatif Mekanisme Perekrutan Guru

Usulan Rekrutmen Per Tahun (2018-2024) termasuk untuk menggantikan yang pensiun dan kebutuhan guru karena kenaikan akses.

Di tahun selanjutnya, kita juga harus mengantisipasi bukan saja guru yang pensiun, tetapi juga perluasan akses pendidikan.

Total kebutuhan rekrutmen guru PNS 2018-2024 termasuk untuk menggantikan guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan perluasan akses pendidikan

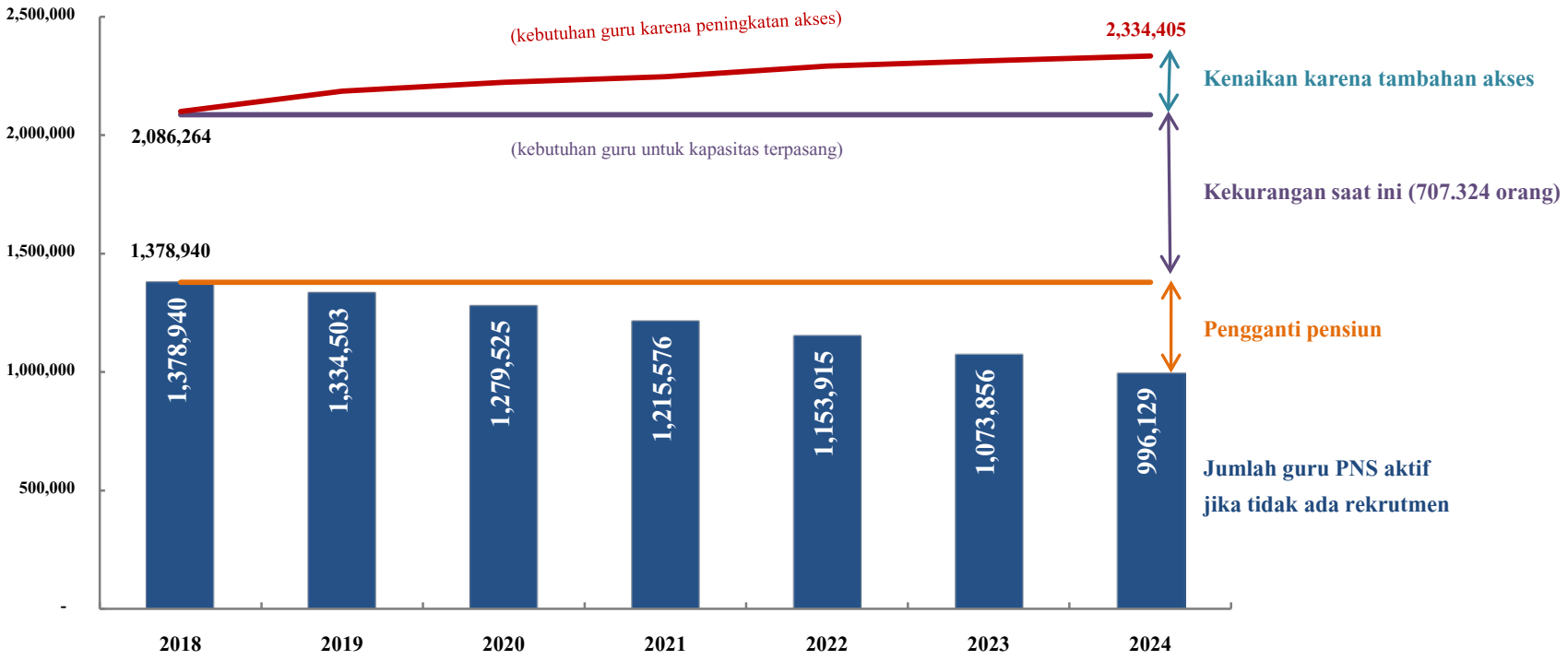

Alternatif Mekanisme Rekrutmen 159.971 guru Tahun 2018

Alt 1

≤ 35 tahun
Bersertifikat

Yang bisa mendaftar

4.019 dari sekolah negeri
23.606 dari sekolah swasta

Alt 2

≤ 40 tahun
Bersertifikat

8.999 dari sekolah negeri
69.365 dari sekolah swasta

Semakin besar rentang usia,
semakin banyak guru Non-PNS yang bisa melamar

Alt 3

≤ 35 tahun
Tidak bersertifikat

Yang bisa mendaftar

417.429 dari sekolah negeri 304.336 dari sekolah swasta

Alt 4

≤ 40 tahun
Tidak bersertifikat

514.403 dari sekolah negeri, 410.939 dari sekolah swasta

Tambahan

PPPK, 40 - 46 tahun
Tidak bersertifikat

3.835 dari sekolah negeri
50.765 dari
sekolah swasta

Konsekuensi: Penyediaan anggaran untuk PPG

03
Kebutuhan Dana

Sebetulnya kita tidak membutuhkan tambahan anggaran untuk merekrut guru PNS baru.

Total gaji aktual guru PNS saat ini dan tambahan anggaran gaji yang dibutuhkan untuk guru PNS yang akan direkrut (dalam triliun rupiah)

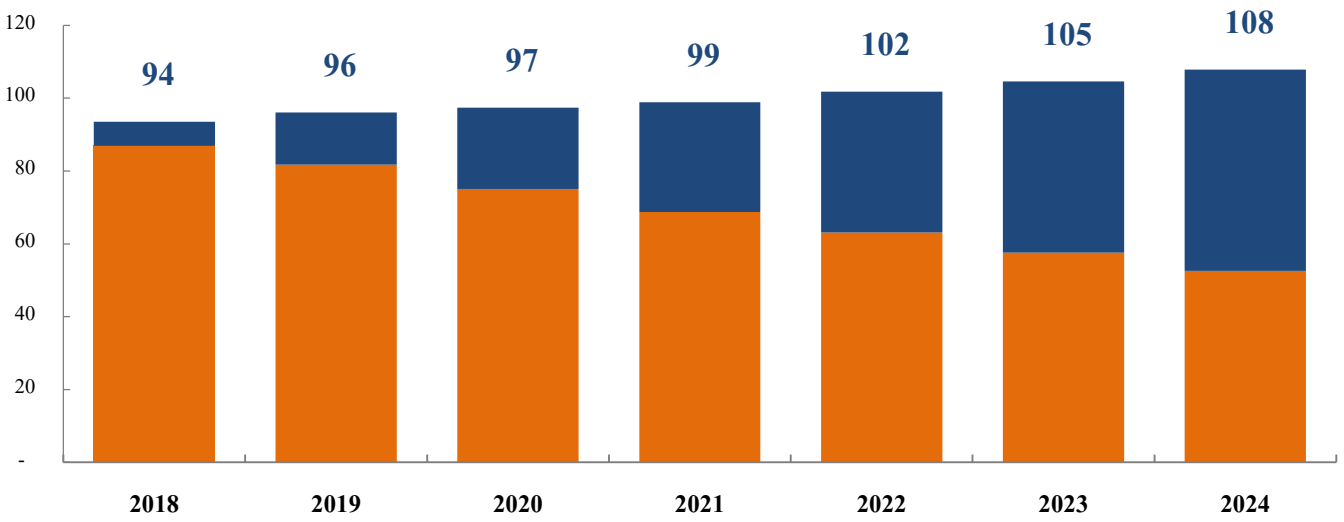

Kebutuhan anggaran setiap tahun dari 2018 - 2024 masih di bawah DAU untuk gaji guru tahun 2018, yaitu **Rp136 triliun**.

Tambahan anggaran untuk gaji guru baru

Gaji aktual guru PNS setelah dikurangi yang pensiun

04

Langkah-Langkah Yang Harus Ditempuh

Langkah-langkah yang akan ditempuh

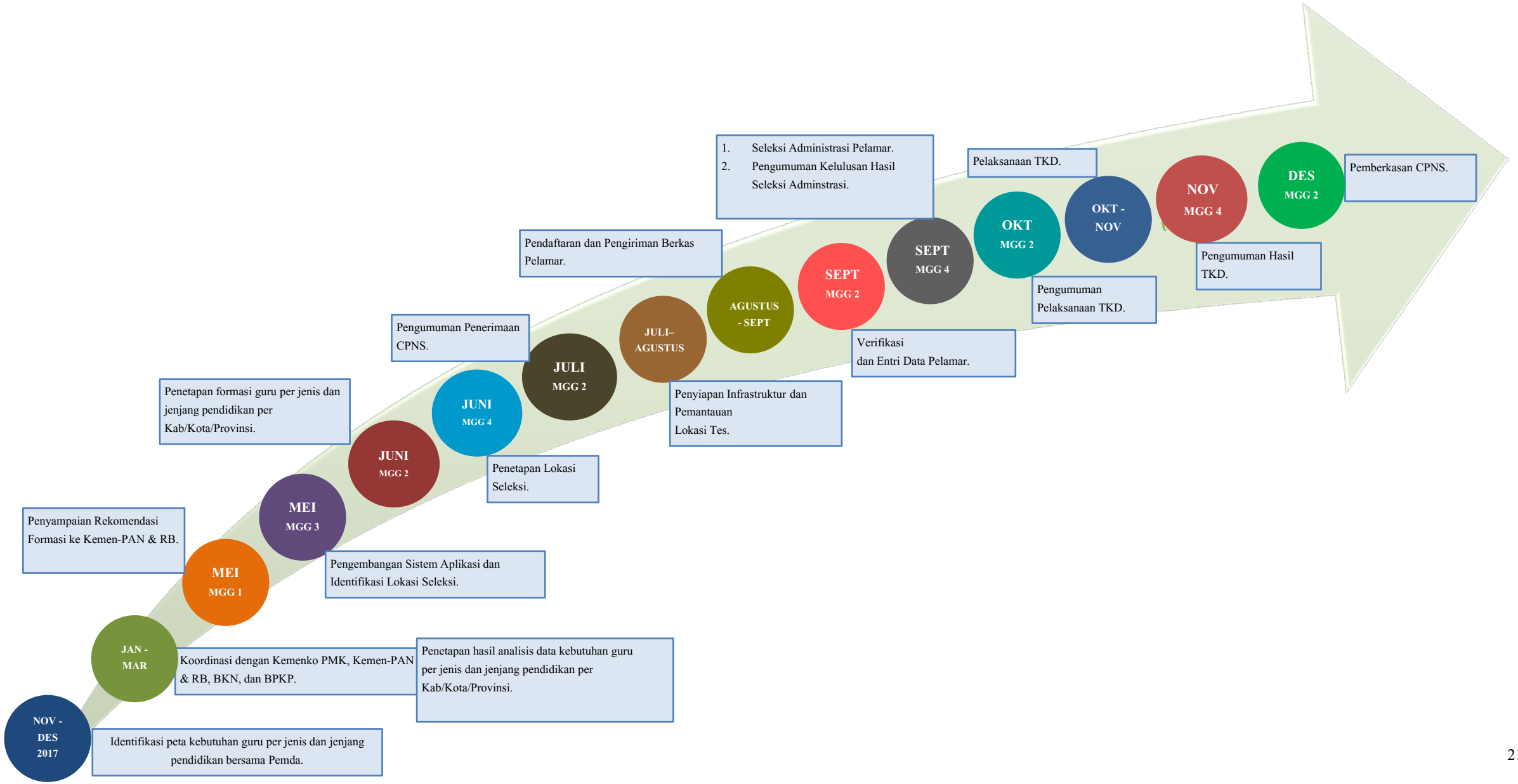

05

Tindak Lanjut

INFORMASI DARI KEMENPAN RB

PEMETAAN KEBUTUHAN GURU TERMASUK GURU AGAMA BERDASARKAN E-FORMASI DARI USULAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

KEMENTERIAN PANRB RI

Kebutuhan guru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA, SMK): **677.610**

- 34 Provinsi dengan jumlah kebutuhan guru di Sekolah Negeri: **82.617**
- 514 Kab/Kota dengan jumlah kebutuhan guru di Sekolah Negeri: **594.993**

JUMLAH KEBUTUHAN GURU (eformasi maret 2018)

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	PNS	KEKURANGAN	USUL
1	GURU KELAS	883.414	611.366	272.048	170.890
2	GURU AGAMA ISLAM	162.167	81.673	80.494	41.968
3	GURU PENJASORKES	162.043	73.070	88.973	54.838
4	GURU MATEMATIKA	61.940	44.288	17.652	10.860
5	GURU BAHASA INDONESIA	61.123	42.854	18.269	11.380
6	GURU BAHASA INGGRIS	54.620	38.635	15.985	10.317
7	GURU BIMBINGAN KONSELING	47.013	19.083	27.930	16.543
8	GURU IPA	42.577	34.377	8.200	6.957
9	GURU IPS	40.003	34.042	5.961	5.836
10	GURU SENI BUDAYA	32.533	13.018	19.515	12.331
11	GURU PPKN	29.553	20.030	9.523	6.209
12	GURU MUATAN LOKAL	27.306	8.184	19.122	11.909
13	GURU AGAMA KRISTEN	23.385	11.227	12.158	7.694
14	GURU TIK	18.670	4.940	13.730	8.069
15	GURU AGAMA KATOLIK	12.715	5.026	7.689	5.271
16	GURU FISIKA	10.815	6.913	3.902	2.073
17	GURU SEJARAH	10.116	4.920	5.196	2.632
18	GURU BIOLOGI	9.892	7.230	2.662	1.506
19	GURU KIMIA	9.070	6.152	2.918	1.446
20	GURU LAINNYA	107.036	61.352	45.684	26.286
	JUMLAH	**1.805.991**	**1.128.380**	**677.611**	**415.015**

INFORMASI DARI KEMENAG

JUMLAH KEBUTUHAN GURU

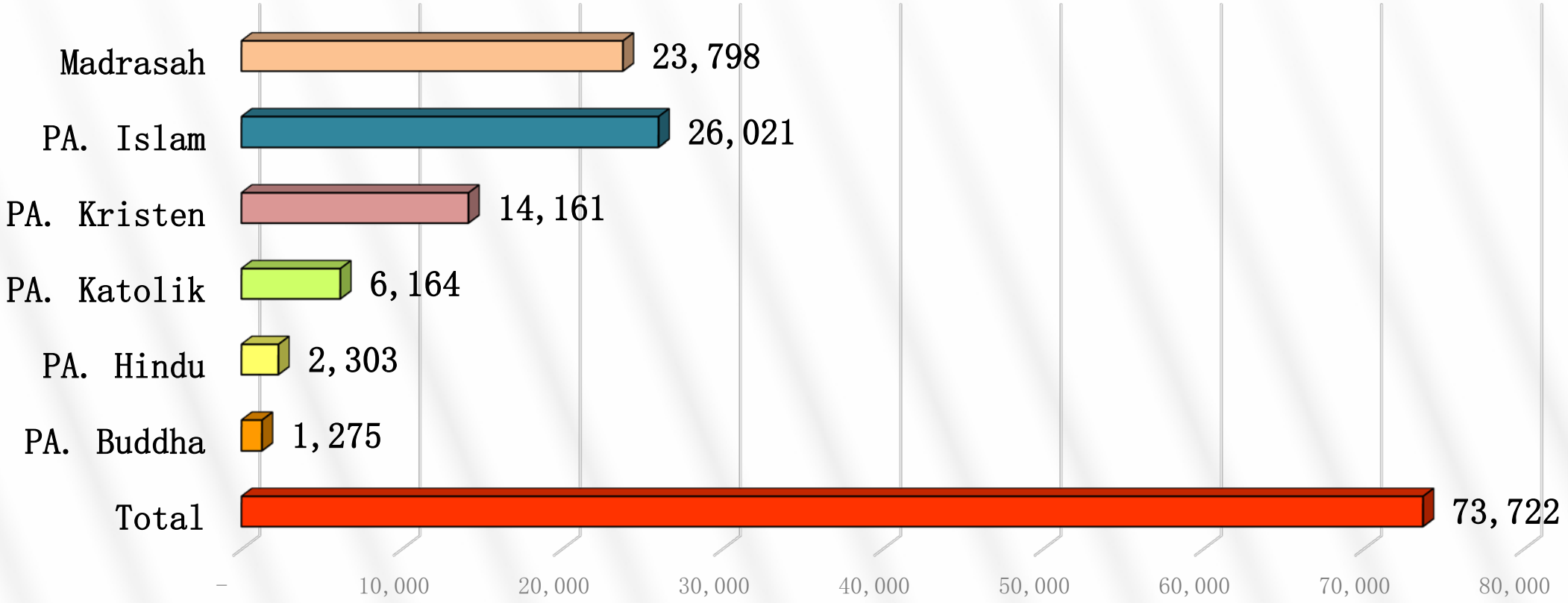

Jumlah Seluruh Kebutuhan Guru:

73.722 Guru

RINCIAN KEBUTUHAN GURU PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI (Bag. I)

No.	Jenis dan Jenjang Guru	Jumlah Guru PNS	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru
1	Guru Madrasah				
	a. Madrasah Ibtidaiyah	48.666	507.581	19.885	7.126
	b. Madrasah Tsanawiyah	47.497	760.094	23.939	8.377
	c. Madrasah Aliyah	24.855	454.317	14.593	8.295
	JUMLAH	**121.018**	**1.721.992**	**58.417**	**23.798**
2	Guru Pendidikan Agama Islam				
	a. Sekolah Dasar	91.809	18.086.844	971.215	20.298
	b. Sekolah Menengah Pertama	21.422	5.324.310	256.088	1.885
	c. Sekolah Menengah Atas	12.396	4.155.090	178.553	3.838
	JUMLAH	**125.627**	**27.566.244**	**1.405.856**	**26.021**
3	Guru Pendidikan Agama Kristen				
	a. Sekolah Dasar	9.820	2.340.197	156.013	9.282
	b. Sekolah Menengah Pertama	3.968	947.131	63.142	2.346
	c. Sekolah Menengah Atas	2.429	744.336	49.622	2.533
	JUMLAH	**16.217**	**4.031.664**	**268.777**	**14.161**

RINCIAN KEBUTUHAN GURU PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI (Bag. II)

No.	Jenis dan Jenjang Guru	Jumlah Guru PNS	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru
4	Guru Penddikan Agama Katolik				
	a. Sekolah Dasar	6.876	994.543	66.303	3649
	b. Sekolah Menengah Pertama	1.411	443.885	24.542	1.362
	c. Sekolah Menengah Atas	1.119	368.116	29.593	1.153
	JUMLAH	**9.406**	**1.806.544**	**120.438**	**6.164**
5	Guru Pendidikan Agama Hindu				
	a. Sekolah Dasar	4.633	408.997	27.266	332
	b. Sekolah Menengah Pertama	1.056	248.512	16.567	1.043
	c. Sekolah Menengah Atas	686	200.130	13.342	928
	JUMLAH	**6.375**	**857.639**	**57.175**	**2.303**
6	Guru Pendidikan Agama Buddha				
	a. Sekolah Dasar	630	152.733	10.182	651
	b. Sekolah Menengah Pertama	127	67.110	4.474	321
	c. Sekolah Menengah Atas	77	57.183	3.812	303
	JUMLAH	**834**	**277.026**	**18.468**	**1.275**
JUMLAH SELURUH		158.459	34.539.117	1.870.714	73.722

SKEMA PEREKRUTAN

GURU PENDIDIKAN AGAMA PNS DALAM 5 TAHUN

No.	Guru Pendidikan Agama	TAHUN					TOTAL
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Madrasah	7.139	5.950	4.760	3.570	2.380	23.799
2	Guru Pendidikan Agama Islam	50.713	42.261	33.808	25.356	16.904	169.042
3	Guru Pendidikan Agama Kristen	4.248	3.540	2.832	2.124	1.416	14.160
4	Guru Pendidikan Agama Katolik	1.849	1.541	1.233	925	616	6.164
5	Guru Pendidikan Agama Hindu	691	576	461	345	230	2.303
	Guru Pendidikan Agama						

Prioritas Pengadaan Guru - SD

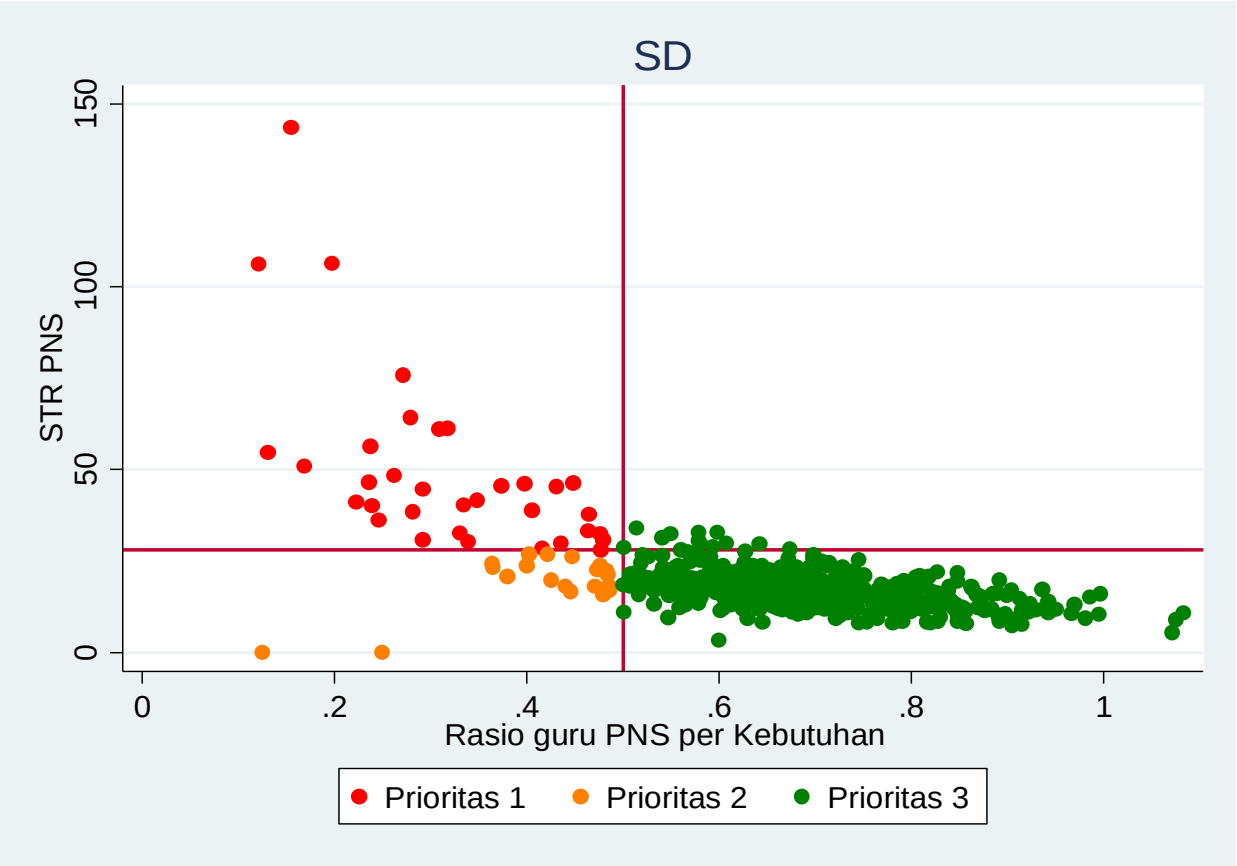

Prioritas	Jumlah Kab/Kota	Kebutuhan Guru	Jumlah PNS	Kekurangan
1	36	63.839	26.234	37.605
2	21	32509	14941	17.568
3	463	1.174.698	782.541	392.157

Note:
Prioritas 1: daerah yang memiliki STR PNS>28 dan Rasio Guru PNS per Kebutuhan <50%
Prioritas 2: daerah yang memiliki STR PNS<28 dan Rasio Guru PNS per Kebutuhan <50%
Prioritas 3: daerah yang memiliki Rasio Guru PNS per Kebutuhan >50%

06

PENDATAAN MELALUI DAPODIK DAN PERMENDIKBUD NO. 10 TAHUN 2018

DAPODIK

Dasar Hukum

- (Instruksi Menteri No. 2 Thn 2011)
- Surat Mendikbud agar semua Unit utama memanfaatkan DAPODIK dan Tidak Ada Penjaringan Data di luar DAPODIK

DAPODIK sebagai sumber data tunggal dirancang bersifat **Individual**, **Relasional** dan **Longitudinal** mencakup 4 entitas yaitu Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Substansi Pendidikan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dapodik satu-satunya acuan sumber data dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan.

PEMANFAATAN DAPODIK

1. STATISTIK PENDD. (PDSP)
2. PENGELOLAAN KODE REFERENSI (PDSP)
3. BOS (DIT. SD/PSMP/PLB)
4. BSM (DIT. SD/SMP/PLB)
5. REHAB (DIT. SD/SMP/SLB)
6. USB (DIT. SD/SMP/SLB)
7. RAPOT SISWA (DIT. SD/SMP/SLB)
8. PELAKSANAAN UN (DIT. SD/SMP/SLB)
9. INPASSING (GTK)
10. TUNJ. GURU (GTK)
11. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU (GTK)
12. PAK GURU (GTK)
13. SERTIFIKASI GURU (GTK)
14. GURU PEMBELAJAR (GTK)

4 ENTITAS DAPODIK YANG DIJARING SECARA BERSAMAAN DENGAN LEVEL DATABASE INDIVIDUAL

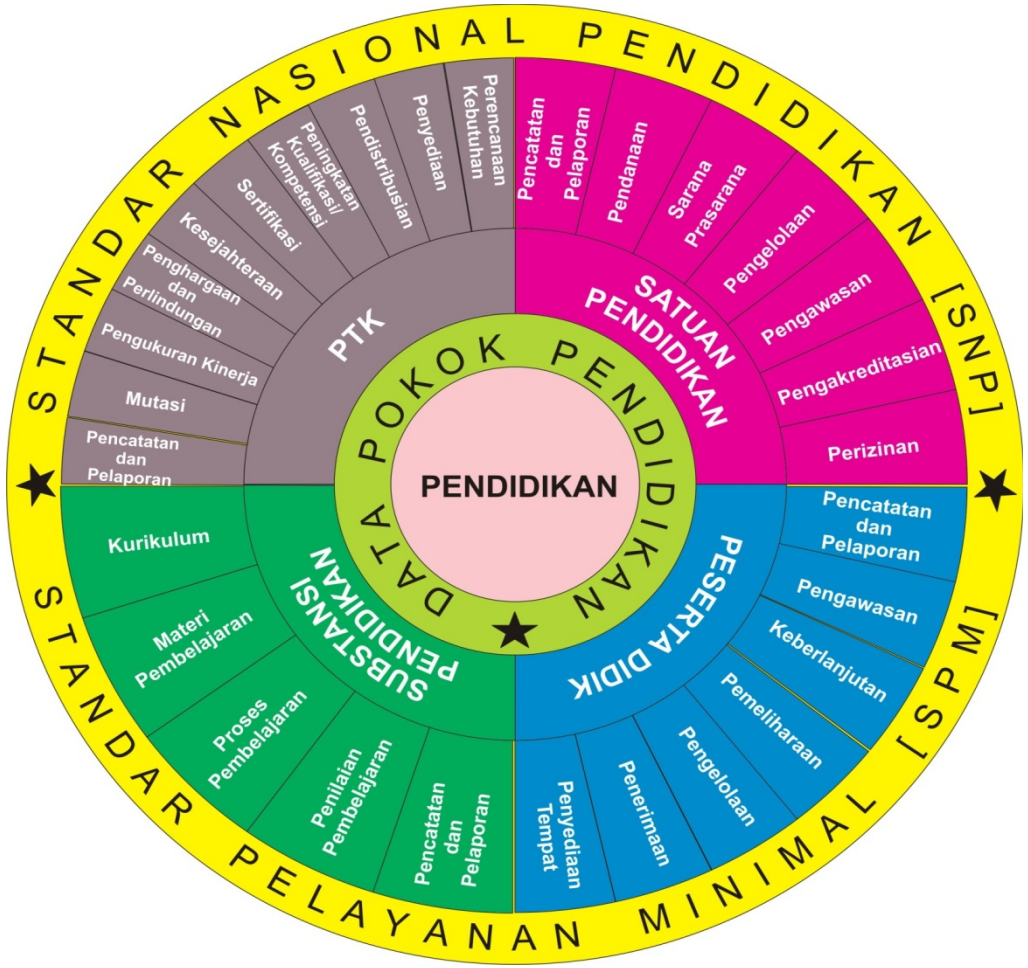

PROGRESS PENGIRIMAN ONLINE

DAPO.DIKDAS.KEMDIKBUD.GO.ID

ALUR DATA DAN INFORMASI KEMDIKBUD DAN LAYANAN INFORMASI GTK

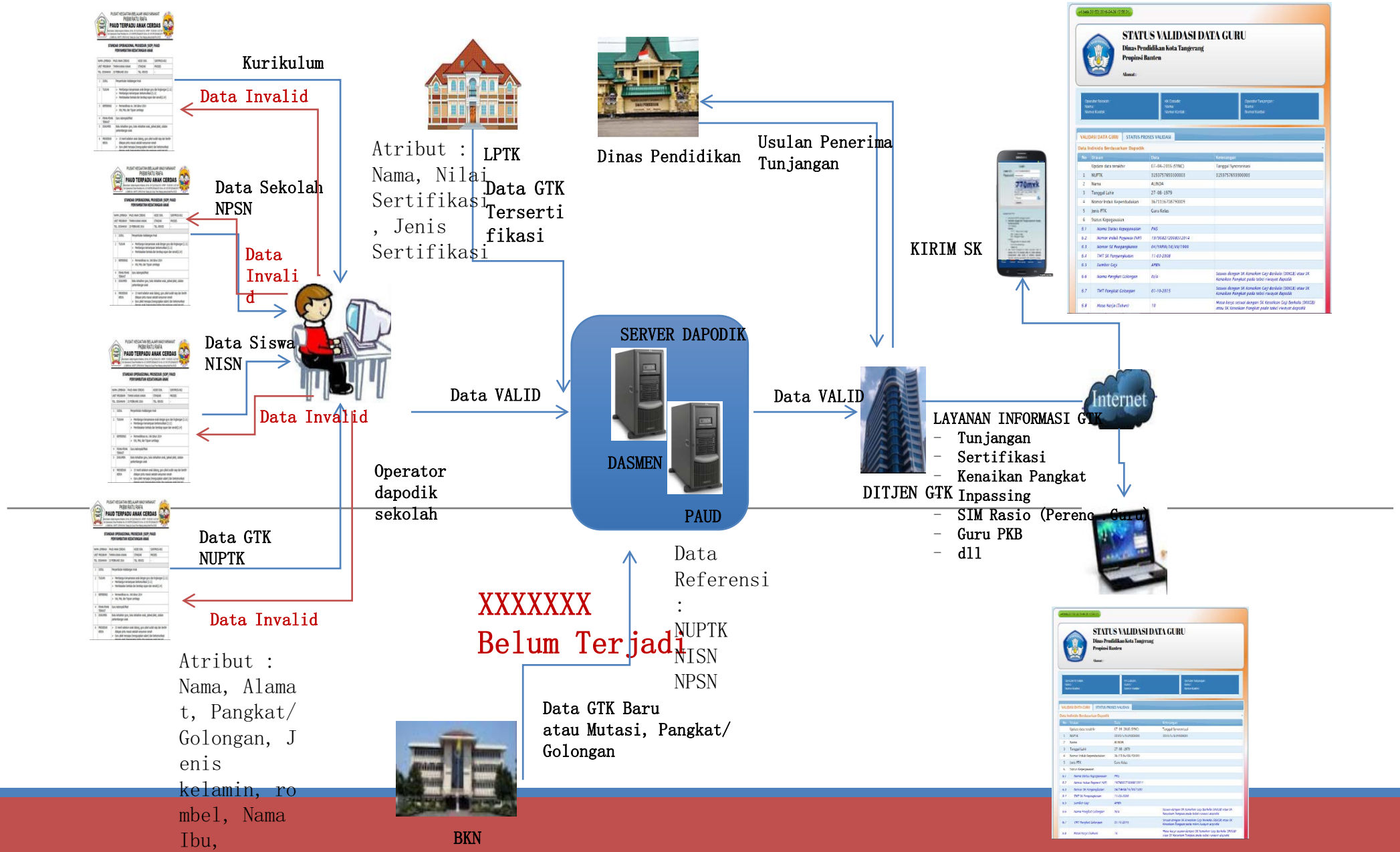

INTEGRASI DATA ANTARA KEMENDIKBUD DENGAN BKN

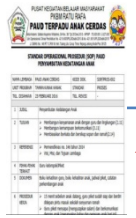

Kurikulum

Data Invalid

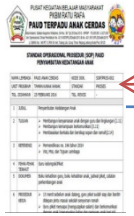

Data Sekolah
NPSN

Data Invali
d

Data Siswa
NISN

Data Invalid

Data GTK
NUPTK

Data Invalid

Atribut :
Nama, Alamat, Pang
kat/Golongan, Jeni
s
kelamin, rombel, N
ama Ibu,

Operator
dapodik
sekolah

Data VALID

Proses Penilaian Angka
Kredit
Variabel :
NUPTK, Nama
Guru, Kualifikasi, Masa
Kerja, Linieritas Mata
pelajaran, Linieritas
kualifikasi, Beban tugas
Guru, dsb...
Output :
Pangkat/Golongan dan

LPTK

Atribut :
Nama, Nilai
Sertifikasi, J
enis
Sertifikasi

Data GTK
Terserti
fikasi

SERVER DAPODIK

DASMEN

PAUD

Tidak
Merubah
Proses
Data Valid
setelahnya

Data VALID

Data
Referensi
:
NUPTK
NISN
NPSN

HAL BARU/PERBAIKAN :

Entitas : Data GTK Baru
atau Mutasi, Pangkat/
Golongan dan Jabatan Fungsional Guru.
Atribut : NUPTK, Nama Guru, Lokasi,
Mapel yang diajarkan, dsb

BKN

	Entitas	Aktivitas
Peserta Didik	NISN, Nama, Tgl Lahir, NPSN, Kelas, Rombel, ...	Masuk, Naik Kelas, Tinggal Kelas, Drop-Out, Pindah, Lulus, Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan, ...
PTK	NUPTK, Nama, Tgl Lahir, NPSN, Riwayat Pendidikan, Riwayat Kepangkatan, Sertifikasi	Mutasi, Sertifikasi, Peningkat-an Kualifikasi, Tugas Mengajar (mapel, buku teks, rombel), Tugas Lain, Penghargaan, Menerima Beasiswa, ...
Sekolah	NPSN, Nama, Alamat, Koordinat, Foto, Ruang (Kapasitas, Kondisi, Tgl Perbaikan Terakhir,...), Status Akreditasi, ...	Menerima Hibah, Menerima BOS/BOMM, Pengusulan Akreditasi, ...

FORMULA MENGHITUNG BEBAN MENGAJAR GURU

$$\frac{\text{Rombel x jam}}{24} \text{ mapel (standar isi)}$$

Dapodik dirancang dapat mendeteksi guru mengajar dibeberapa sekolah untuk memenuhi 24 jam

Perencanaan Kebutuhan GTK

SEKOLAH 1

Dapodik

SEKOLAH 2

Dapodik

SEKOLAH N

Dapodik

On-Line Base

On-Line Base

Kemdikbud

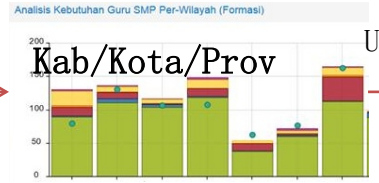

Kab/Kota/Prov

Peta Kelebihan dan Kekurangan Guru per mapel per kab/kota

Formula kebutuhan guru per satuan pendidikan/per mapel

Usulan Formasi CPNS Guru

MENPAN

Pengendalian Formasi CPNS Kab/Kota **(Amanat UU 23 Th. 2014)**

Formasi CPNS GURU setelah ada pengendalian formasi dari Kemdikbud

KAB/KOTA/PROV

KAB/KOTA/PROV

KAB/KOTA/PROV

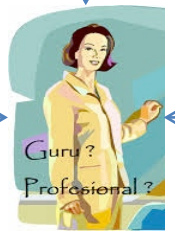

KRITERIA CALON GTK

- S-1/D-IV
- PPG
- INDUKSI (PNS/NON)
- PRAJABATAN (PNS/PPPK)
- Pendidikan di LP2KS

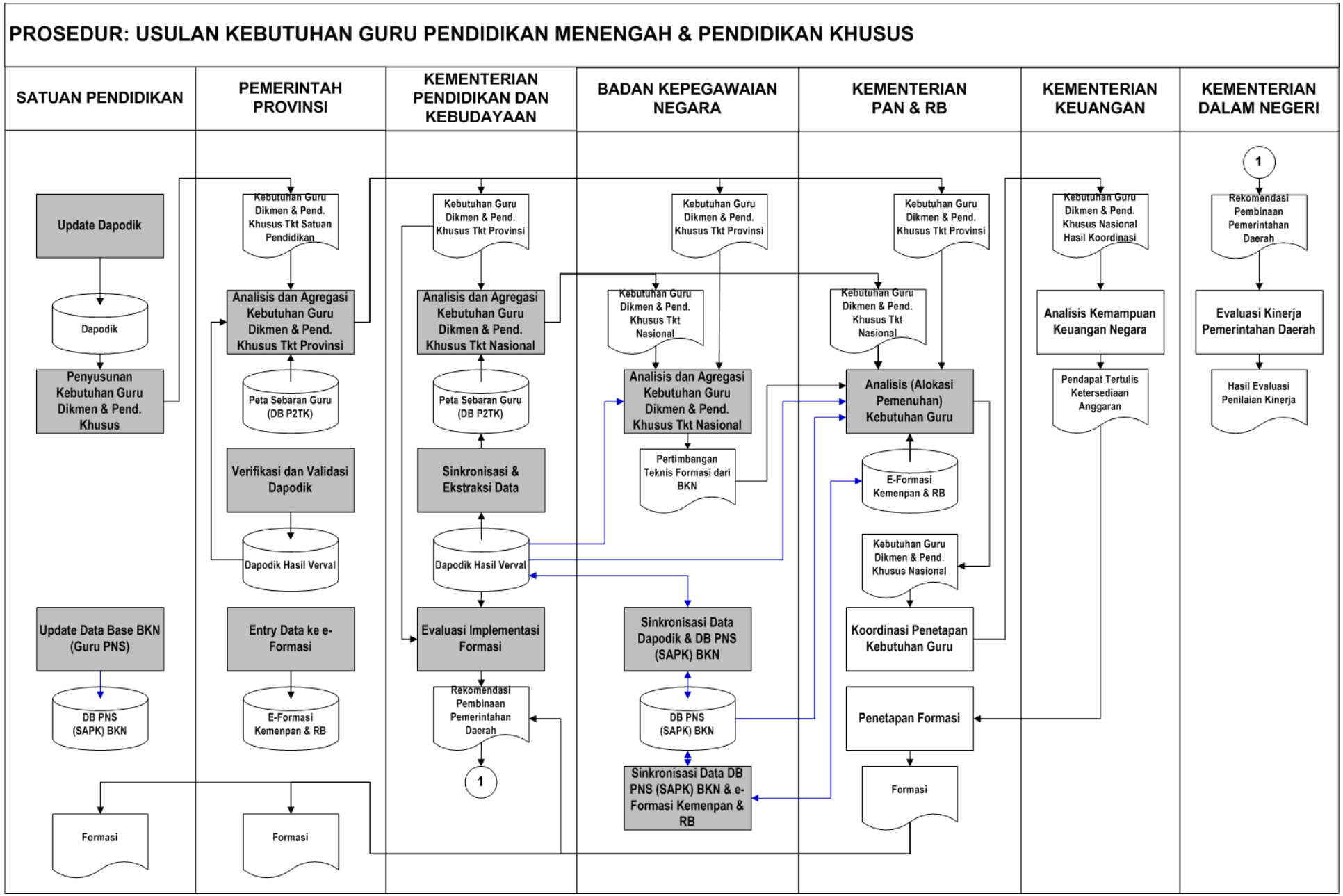
PROSEDUR: USULAN KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH & PENDIDIKAN KHUSUS
SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEMENTERIAN PAN & RB
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Update Dapodik
Dapodik
Penyusunan Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus
Update Data Base BKN (Guru PNS)
DB PNS (SAPK) BKN
Formasi
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Satuan Pendidikan
Analisis dan Agregasi Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Provinsi
Peta Sebaran Guru (DB P2TK)
Verifikasi dan Validasi Dapodik
Dapodik Hasil Verval
Entry Data ke e-Formasi
E-Formasi Kemenpan & RB
Formasi
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Provinsi
Analisis dan Agregasi Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Nasional
Peta Sebaran Guru (DB P2TK)
Sinkronisasi & Ekstraksi Data
Dapodik Hasil Verval
Evaluasi Implementasi Formasi
Rekomendasi Pembinaan Pemerintahan Daerah
1
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Provinsi
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Nasional
Analisis dan Agregasi Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Nasional
Pertimbangan Teknis Formasi dari BKN
Sinkronisasi Data Dapodik & DB PNS (SAPK) BKN
DB PNS (SAPK) BKN
Sinkronisasi Data DB PNS (SAPK) BKN & e-Formasi Kemenpan & RB
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Provinsi
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Tkt Nasional
Analisis (Alokasi Pemenuhan) Kebutuhan Guru
E-Formasi Kemenpan & RB
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Nasional
Koordinasi Penetapan Kebutuhan Guru
Penetapan Formasi
Formasi
Kebutuhan Guru Dikmen & Pend. Khusus Nasional Hasil Koordinasi
Analisis Kemampuan Keuangan Negara
Pendapat Tertulis Ketersediaan Anggaran
1
Rekomendasi Pembinaan Pemerintahan Daerah
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja

JENIS APLIKASI LINGKUP DITJEN GTK

VALIDASI DATA GURU | STATUS PROSES VALIDASI

Data Individu Berdasarkan Dapodik

No	Uraian	Data
	Update data terakhir	04-05-2016 (SYNC)
1	NUPTK	5863768668210002
2	Nama	Cicin Aminah
3	Tanggal Lahir	31-05-1990
4	Nomor Induk Kependudukan	3526017105900005
5	Jenis PTK	Tenaga Administrasi Sekolah
6	Status Kepegawaian	
6.1	*Nama Status Kepegawaian*	*Tenaga Honor Sekolah*
6.2	*Nomor Induk Yayasan (NIY)*	-
6.3	*Nomor SK Pengangkatan*	-
6.4	*TMT SK Pengangkatan*	*01-01-1970*
6.5	*Sumber Gaji*	*Lainnya*
7	Ijazah Terakhir	S1
8	Status Kuliah	
9	Tugas Tambahan	
9.a	*Nama Tugas Tambahan*	*Pustakawan*
9.b	*Nomor SK Tugas Tambahan*	-
9.c	*TMT Tugas Tambahan*	--

Sudah diangkat jadi guru 20 tahun sebelum Lahir

PASTIKAN DATA DAPODIK BENAR

VALIDASI DATA GURU | STATUS PROSES VALIDASI

Data Individu Berdasarkan Dapodik

No	Uraian	Data
	Update data terakhir	28-04-2016 (SYNC)
1	NUPTK	6957764666300040
2	Nama	Indi Shofi Fikria
3	Tanggal Lahir	25-06-1986
4	Nomor Induk Kependudukan	3526016506860005
5	Jenis PTK	Guru Mata Pelajaran
6	Status Kepegawaian	
6.1	*Nama Status Kepegawaian*	*PNS*
6.2	*Nomor Induk Pegawai (NIP)*	*198606252014072001*
6.3	*Nomor SK Pengangkatan*	*813.3/559/433.206/2014*
6.4	*TMT SK Pengangkatan*	*30-03-2016*
6.5	*Sumber Gaji*	*APBD Kabupaten/Kota*
6.6	*Nama Pangkat Golongan*	-
6.7	*TMT Pangkat Golongan*	-
6.8	*Masa Kerja (Tahun)*	*0*
6.9	*Gaji Pokok*	*1500000.00*
7	Ijazah Terakhir	S1
8	Status Kuliah	
9	Tugas Tambahan	
10	*Sekolah Induk*	---

STATUS GURU PNS
TIDAK MENGISI TMT
TIDAK MENGISI MASA KERJA
AKIBATNYA
GAJI POKOK = 1.500.000

LAYANAN BERBASIS ONLINE UNTUK VALIDASI DATA GURU

http:/info.gtk.kemdikbud.go.id

Prosess data
29 May 2017
Jam 18:38:03 malam

Info validasi data guru ini fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah, jika ada kesalahan data, proses perbaikannya melalui aplikasi dapodik disekolah masing-masing.

Provinsi: Pilih Provinsi
Kabupaten/Kota: Pilih Kabupaten/kota
Jenjang: Pilih Jenjang

Periode Januari - Juni 2017
(Semester 2 2016/2017)
Status : Persiapan SKTP

Daftar Nama Guru Belum Valid sehingga SKTP tidak bisa terbit (periode Januari-Juni 2017), silahkan perbaiki

☑ Sudah Pensiun ☑ Belum Pensiun

Tampilkan data Guru

Nama	Usia	Nama Sekolah
ALIMUDDIN	49	Pengawas Dinas Pendidikan Kab. P...
Bambang Rusmanto,s.pd	58	SDN BLABAK II KEC. KANDAT Kab K...
Dra. Juariah	57	SMP NEGERI 2 PAMATANG SIDAMA...
Dra. Kustiati	56	Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
Dra. SAHRI AMANI	56	Pengawas Dinas Pendidikan Kota L...
Dra. Suhartatik, Sa	60	SMAN 1 GIRI
Drs. Anang Susilo	53	Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
Drs. Imam Asnawi, Mba	58	Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
Drs. Slamet	58	Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
Drs.ariayniaty	58	SMK 2 PAHANDUT

Go to page: 1 Show rows: 10 1-10 of 117608

Keterangan Validasi

Login Validasi Data Guru

1261740652300003

••••••••

Semester 2 (2016/2017)

955933

Masukan kode yang tertulis pada gambar diatas

Login

VALIDASI PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH 19/2017

Status Data Kelulusan Sertifikasi Pendidik

	No	Uraian	Data	Keterangan
	1	Nama	Nurija	
	2	NIP	195909261981112001	
	3	NUPTK	8258737639300023	
a	4	Nomor Peserta Sertifikasi	08090108410586	
b	5	Nomor Registrasi Guru (NRG)	085832051014	
f	6	Nama Sekolah	SMP N 1 TAMBANG	
	7	Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	
	8	Kode Bidang Studi Sertifikasi	084	
d	9	Nama Bidang Studi Sertifikasi	Pendidikan Kewarganegara (PKn)	
	10	Perbaikan Data	-	

Drag kolom kesini untuk membuat group

	NO	Nama Sekolah	Status P	Mata Pelajaran diampu	
			Nama	Nama Mapel	Lini
▸	1	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
▸	2	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
▸	3	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
▸	4	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.4	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1

(4) Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;

b. memiliki nomor registrasi Guru;

c. memenuhi beban kerja;

d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;

g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan

h. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

VALIDASI DATA GURU

Data Individu Berdasarkan Dapodik

No	Uraian	Data	Keterangan
	Update data terakhir	23-03-2017 (SYNC)	Tanggal Syncronisasi
1	NUPTK	8258737639300023	8258737639300023
2	Nama	Nurija	
3	Tanggal Lahir	26-09-1959	
4	Nomor Induk Kependudukan	1471016609590021	
5	Jenis PTK	Guru Mapel	
6	Status Kepegawaian		
6.1	*Nama Status Kepegawaian*	*PNS*	
6.2	*Nomor Induk Pegawai (NIP)*	*195909261981112001*	
6.3	*Nomor SK Pengangkatan*	*12978/c/2/1982*	
6.4	*TMT SK Pengangkatan*	*01-06-1983*	
6.5	*Sumber Gaji*	*APBN*	
6.6	*Nama Pangkat Golongan*	*IV/a*	
6.7	*TMT Pangkat Golongan*	*01-11-2016*	
6.8	*Masa Kerja (Tahun)*	*30*	
6.9	*Gaji Pokok*	*4616600.00*	
7	Ijazah Terakhir	S1	
8	Status Kuliah		
9	Tugas Tambahan		
9.a	*Nama Tugas Tambahan*	*Kepala Perpustakaan*	
9.b	*Nomor SK Tugas Tambahan*	*420/P dan K-Dikdas/6775.av*	
9.c	*TMT Tugas Tambahan*	*11-07-2016*	
16	Tahun Pensiun	2019-09-26	
17	Jumlah Jam Mengajar	12	Jumlah Jam Mengajar sesuai entrian dapodik
18	Jumlah Jam Linier	12	Jumlah Jam Mengajar linier dengan sertifikasi guru
19	Jumlah Jam Linier + Tugas tambahan	24	Jumlah Jam Mengajar linier dan jam tugas tambahan bagi guru yang menerima tugas tambahan

e

c

c

(4) Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;

b. memiliki nomor registrasi Guru;

c. memenuhi beban kerja;

d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;

g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan

h. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

Drag kolom kesini untuk membuat group

	NO	Nama Sekolah	Status Mata Pelajaran diampu			Semester	Jumlah Jam Mengajar (JJM)				JJM Rombel	Jumlah Siswa
			Nama	Nama Mapel	Linier		Kurikulum	Dapodik	Diakui	Linier		
▸	1	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2016/2	3	3	3	3	3	20
▸	2	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2016/2	3	3	3	3	3	21
▸	3	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2016/2	3	3	3	3	0	20
▸	4	SMP NEGERI 1 TAMBANG	Kelas VII.4	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2016/2	3	3	3	3	0	20
										12		

h

c

(4) Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;

b. memiliki nomor registrasi Guru;

c. memenuhi beban kerja;

d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;

g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan

h. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

Tampilan info pembayaran Tunjangan guru dengan status sudah SP2D dari Pemda

Tunjangan Profesi

No	Uraian	Data	Keterangan
1	Nomor Urut SK	43	Nomor urut pada SK cetak
2	Tanggal Penerbitan SK	03-04-2017	
3	Nomor SK	0043.0901/C5/TP/T1/2017	
4	Tanggal Berlaku Mulai	01-01-2017	Tanggal mulai berlakunya SK yang bisa dibayarkan
5	Tanggal Akhir Berlaku	30-06-2017	Tanggal akhir belakunya SK yang bisa dibayarkan
6	Format Bayar	Transfer daerah	
7	Nama Penerima SK	Nurija	
8	NIP	195909261981112001	
9	NUPTK	8258737639300023	
10	Nomor Registrasi Guru	085832051014	
11	Nomor Peserta Sertifikasi	08090108410586	
12	Nama Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	
13	Nama Provinsi	Prop. Riau	
14	Data Bank		
14.a	Nama Bank	BANK RAKYAT INDONESIA	Nama bank penyalur tunjangan
14.b	Cabang Bank	03364 -- UNIT BANGKINANG KOTA	Nama Cabang bank penyalur tunjangan
14.c	Nomor Rekening Bank	33640102663xxxx	Nomor Rekening yang digunakan
14.d	Nama Pada Rekening Bank	NURIJA	Nama pada rekening

Bulan		Dasar Gaji P...		Status Pembayaran					Data Bank			
		Gol.	Masa ...	N..	No. SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Sebe...	Status	Nama Bank	Cabang Bank	Nomor Rekening	Nama Pada Rek..
1	Januari	IV/a	30	N.. 0..	Nomor: 00576/SP2...	11-04-2017	4,616,600.00	Sudah dibayarkan	BANK RAKYAT INDONESIA	03364 -- UNIT BANGKINANG KOTA	336401026638...	NURIJA
2	Februari	IV/a	30	N.. 0..	Nomor: 00576/SP2...	11-04-2017	4,616,600.00	Sudah dibayarkan	BANK RAKYAT INDONESIA	03364 -- UNIT BANGKINANG KOTA	336401026638...	NURIJA
3	Maret	IV/a	30	N.. 0..	Nomor: 00576/SP2...	11-04-2017	4,616,600.00	Sudah dibayarkan	BANK RAKYAT INDONESIA	03364 -- UNIT BANGKINANG KOTA	336401026638...	NURIJA

DOKUMEN ELEKTRONIK KEHADIRAN GURU PERHARI DISEKOLAH

Data Kehadiran Guru

Beranda | Kehadiran | Profile

Profile Sekolah

Nama Sekolah : SD N 5 xxxxxxx

NPSN : xxxxxxxx

Nama Kepala Sekolah : xxxxxxxx

Alamat Sekolah : xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

Kecamatan : xxxxxxxx

Kabupaten : xxxxxxxx

Provinsi : xxxxxxxx

Hari Libur

June 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Verifikasi dan Fakta Integritas

Verifikasi Kepala Sekolah

Fakta Integritas

Supervisi Pengawas

Semester: 20171

Bulan: Juni

Refresh

no	Nama Guru	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	H-11	H-12	H-13	H-14	H-15	H-16	H-17	H-18	H-19	H-20	H-21	H-22	H-23	H-24	H-25	H-26	H-27	H-28
1	Abdul Kholiq	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Ahmad Suradijaya	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Edi Mahmudi	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	MUSTADI	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Rusniati	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Saepudin	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Sarpiah	✓	✓	✓	■	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Go to page: 1 Show rows: 10 1-7 of 7

Catatan hasil supervisi pengawas terhadap guru binaannya:

Guru ini pada tanggal 5 juni 2017 oleh sekolah dinyatakan hadir, padahal menurut dokumen kehadiran guru yang bersangkutan sedang izin sakit

VALIDASI DATA GURU

Data Individu Berdasarkan Dapodik

No	Uraian	Data	Keterangan
	Update data terakhir	23-03-2017 (SYNC)	Tanggal Syncronisasi
1	NUPTK	8258737639300023	8258737639300023
2	Nama	Nurija	
3	Tanggal Lahir	26-09-1959	
4	Nomor Induk Kependudukan	1471016609590021	
5	Jenis PTK	Guru Mapel	
6	Status Kepegawaian		
6.1	*Nama Status Kepegawaian*	*PNS*	
6.2	*Nomor Induk Pegawai (NIP)*	*195909261981112001*	
6.3	*Nomor SK Pengangkatan*	*12978/c/2/1982*	
6.4	*TMT SK Pengangkatan*	*01-06-1983*	
6.5	*Sumber Gaji*	*APBN*	
6.6	*Nama Pangkat Golongan*	*IV/a*	*Sesuai dengan SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB) atau SK Kenaikan Pangkat pada tabel riwayat dapodik*
6.7	*TMT Pangkat Golongan*	*01-11-2016*	*Sesuai dengan SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB) atau SK*
6.8	*Masa Kerja (Tahun)*	*30*	
6.9	*Gaji Pokok*	*4616600.00*	
7	Ijazah Terakhir	S1	
8	Status Kuliah		Tidak Sedang Kuliah
9	Tugas Tambahan		
9.a	*Nama Tugas Tambahan*	*Kepala Perpustakaan*	
9.b	*Nomor SK Tugas Tambahan*	*420/P dan K-Dikdas/6775.av*	
9.c	*TMT Tugas Tambahan*	*11-07-2016*	
16	Tahun Pensiun	2019-09-26	-
17	Jumlah Jam Mengajar	12	Jumlah Jam Mengajar sesuai entrian dapodik
18	Jumlah Jam Linier	12	Jumlah Jam Mengajar linier dengan sertifikasi guru
19	Jumlah Jam Linier + Tugas tambahan	24	Jumlah Jam Mengajar linier dan jam tugas tambahan bagi guru yang menerima tugas tambahan

Guru dapat melihat Gaji Pokoknya untuk memastikan nominal gaji sudah benar, Jika ada kesalahan dapat dikoreksi dengan memperbaiki dapodiknya

PERSYARATAN GURU MENERIMA TUNJANGAN MENURUT PASAL 15 PP 19/2017

(4) Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
b. memiliki nomor registrasi Guru;
c. memenuhi beban kerja;
d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan
h. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

Data kelulusan dari LPTK

1. Pusat sebagai anggota konsorsium menerima langsung dari KSG
2. Yang ikut PPG sudah given dari pusat baik jumlah maupun mapelnya sehingga perencanaan dari awal sampai lulus sehingga menghitung kebutuhan anggarannya sudah dilakukan sebelum guru tersebut lulus PLPG/PPG
3. Jika SK diterbitkan Prov/Kab/Kota apakah kelulusan diberikan langsung dari KSG ke Prov/Kab/Kota atau melalui pusat lagi.
4. Point 2 penting untuk menghitung kebutuhan anggaran TPG lulusan baru untuk pengajuan ke Kemenkeu 1 tahun sebelum pembayaran lulusan baru. Siapa yang menghitung kebutuhan TPG untuk lulusan baru tsb?
5. Bagaimana kendali kesesuaian antara yang ikut PPG dgn kebutuhan lapangan, apakah semua PPG yang lulus tetap rencanakan anggarannya pada tahun sebelumnya padahal mereka belum tentu dapat jam.
6. Jika ada guru Kemenag mutasi, belum ada datanya di Kemendikbud sehingga harus ada penyerahan database dari Kemenag

KESIAPAN SK TUNJANGAN GURU – Menggunakan Regulasi Beban Kerja Guru Yang Ada (24 jam per Minggu)

Kurikulum : Belum ada SK
Sekolah 5 hari kerja, termasuk juknis beban kerja guru

Data Sekolah
NPSN

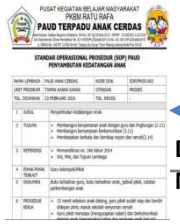

Data Siswa
NISN

Data GTK
NUPTK

Atribut :
Nama, Alamat, Pang kat/Golongan, Jenis kelamin, rombel, Na ma Ibu,

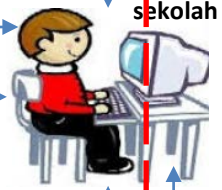

Operator dapodik sekolah

LPTK

Atribut :
Nama, Nilai Sertifikasi, Jenis Sertifikasi

Dinas Pendidikan

Usulan Penerima Tunjangan

KIRIM SK
Durasi : 1 hari

Data GTK
Tersertifikasi

Data VALID

Durasi : 3 hari

Data Referensi :
NUPTK
NISN
NPSN

SERVER DAPODIK

DASMEN

PAUD

Data VALID
Durasi : 2 hari

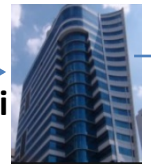

DITJEN GTK

LAYANAN INFORMASI GTK
- Tunjangan
- Sertifikasi
- Kenaikan Pangkat
- Inpassing
- SIM Rasio (Perenc .Guru)
- Guru Pembelajar
- dll

- Hal baru : hanya SK bagi guru yang status PNS nya diakui oleh BKN.
- Sebanyak sekitar 300ribu guru selisih data dengan BKN

Fasilitas perbaikan data guru PNS di BKD dan komunikasi antara BKD dengan BKN yang belum memadai

BKD

BKN

Durasi :
Tergantung kecepatan sekolah

SIKLUS PEKERJAAN SEBELUM TERBIT SKTP

Print Info GTK dan serahkan ke operator Dinas

Print Info GTK yg sudah benar dan di paraf guru

Lihat Info GTK

Periksa kebenaran data

DIPERKUAT

Durasi : Tergantung kecepatan dinas

Centang usulan terbit SKTP

Operator SIMTUN

Durasi : 2 hari

Durasi : 3 hari

Tarik data SKTP & Absensi

Durasi : 1 hari

Durasi : 1 hari

Durasi : 2 hari

Koreksi jika ada salah data

Sinkron Dapodik

Durasi : Tergantung kecepatan sekolah

Operator Sekolah

Guru

Awasi Pekerjaan Operator agar pengisian data benar

- Sekolah Induk
- Beban Kerja
- Gol/Masakerja
- NUPTK
- Tgl Lahir
- Status (PNS/Non)

SIKLUS PEKERJAAN SETELAH TERBIT SKTP

Umumkan ke guru jika ada kesalahan gaji agar diperbaiki segera dapodiknya

Operator SIMBAR

Buat SPM bagi yg terbit SKTP

Durasi : paling lambat 7 hari

Laporan Realisasi

SP2D YG terbayarkan

Status Pembayaran ke Rekening Guru

CUTI GURU

1. Guru PNSD yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru PNSD yang menggunakan cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan berhak mendapatkan cuti alasan penting dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila guru PNSD yang bersangkutan tidak mengajar lebih dari 14 (empat belas) hari karena cuti sakit atau lebih dari 1 (satu) bulan karena cuti alasan penting berdasarkan isian catatan kehadiran dalam aplikasi Hadir GTK, maka kepada guru bersangkutan tidak dapat dibayarkan tunjangan profesinya.

KEKURANGAN BAYAR AKIBAT KGB/ KP/ GOLONGAN

1. Apabila terdapat kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkat/golongan setelah terbitnya SKTP pada semester I, maka dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya tetap membayarkan tunjangan profesi sesuai SKTP dan selisih kenaikan gaji pokok akibat adanya kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkat/golongan akan diakomodir pada SKTP semester II pada tahun berkenaan.
2. Apabila terjadi kekurangan bayar akibat kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkat/golongan setelah terbitnya SKTP pada semester II tahun berkenaan, maka SKTP Kurang Bayar akan diterbitkan pada periode semester I tahun berikutnya.
3. SKTP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) memiliki SKTP reguler semester II pada tahun sebelumnya; dan
   2) memiliki SKTP Kurang Bayar pada tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Ditjen GTK untuk membayar kekurangan tunjangan profesi pada angka 1) yang didasarkan pada laporan kurang bayar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan (SIM-Bar) yang menunjukkan kesesuaian penggunaan uang.

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI LEBIH BAYAR

Apabila guru menerima kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada **semester I tahun berkenaan**, maka nominal tunjangan profesi yang diterima oleh guru yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan.

Apabila guru menerima kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada **semester II tahun berkenaan,** maka guru yang bersangkutan harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MUTASI GURU

1. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian Guru PNSD antarsatuan pendidikan dan/atau antarjenis pendidikan ke lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang berbeda, Guru PNSD yang bersangkutan melaporkan kepada pengelola tunjangan profesi dinas pendidikan asal dan wajib memperbaiki Dapodik di tempat tugas yang baru. Dinas Pendidikan asal menyesuaikan perubahan data pada aplikasi SIM-Tun sesuai dengan wilayah tugas yang baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

2. Apabila terjadi perubahan tempat tugas setelah terbitnya SKTP, maka guru wajib menyerahkan hasil cetak (*print out)* info GTK yang telah diubah satminkal terbarunya kepada dinas pendidikan terdahulu agar pembayaran tunjangan profesi tetap dibayarkan oleh dinas pendidikan ditempat SKTP diterbitkan.

3. Apabila terjadi mutasi Guru PNSD dari satuan pendidikan di lingkungan kementerian lain ke satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka operator sekolah menginput data Guru PNSD yang bersangkutan ke dalam aplikasi Dapodik dan operator dinas pendidikan menambahkan data kelulusan sertifikasi Guru PNSD tersebut ke dalam aplikasi SIM-Tun. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

55

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU

1. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD.
2. Setelah terbit SKTP Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari SIM-Bar yang disediakan oleh Direktorat Jenderal GTK.

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPG

a. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
b. mencapai batas usia 60 tahun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
e. mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
f. tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
g. tidak bertugas lagi sebagai Guru atau pengawas sekolah, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

PEMANTAUAN PEMBAYARAN TPG

Penyaluran Tunjangan Profesi dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi SIM-Bar yang dapat diakses melalui *website* dan aplikasi *smartphone*.

58

PERMASALAHAN GURU MELAPOR KE PUSAT

1. Tunjangan profesi belum diterima guru, sebab SKTP belum terbit karena kesalahan input di Dapodik (tidak linier/JJM tidak normal), JJM 24 jam atau lebih tetapi tidak linier.
2. Guru PNS dan Non PNS sudah terbit SK, namun masih ada keterangan belum memenuhi syarat.
3. SKTP sudah terbit, menanyakan kapan pencairan.
4. Kelulusan sertifikasi mulok PLH tidak jelas, tidak ada mapel di kurikulum dan Perda.

59

APLIKASI BERBASIS ANDROID

TERIMA KASIH..